

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DI DESA TARIPA KECAMATAN PAMONA TIMUR
KABUPATEN POSO**

**ALFRIYANTO TOBADE
GUSTAAF BUDDY TAMPI
JOORIE. M. RURU**

ABSTRACT: Community participation in supervision of development in Taripa Village, the low level of community participation is due to several factors, for example during meetings or Village meetings, representatives who attend are very minimal, the cause of community absence is the activities of the community who have to work, there is also a factor in low community participation on the supervision of development is the minimal mindset of the people who consider development to be the responsibility of the government. The purpose of the study was to determine community participation in monitoring development in Taripa Sub-District, East Pamona Sub-District, Poso Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques used are observation, interviews and data collection with documents. Based on the results of the research and discussion, the authors draw conclusions about Community Participation in the Development Supervision of Taripa Village, East Pamona Sub-District, Poso Regency: Community participation in supervision of development can be said to run well even though there are still people who do not take part in planning and supervising existing development. The supervision carried out by the community towards development in the village of Taripa has experienced an increase where most of the development carried out goes well according to what was previously planned. Suggestions that can be given include the need for coordination between the village government and the community in implementing development. The community is expected to participate in development planning and supervision. The need for the village government to provide clear information to the community regarding the development that will be carried out.

Keywords: Community Participation, Civil Service, development

PENDAHULUAN

Sejak dekade terakhir semakin meningkat kebutuhan akan pendekatan baru dalam pembangunan yang disebut pendekatan partisipatif atau partisipasi. Pendekatan partisipatif atau partisipasi tersebut muncul sebagai akibat dari sistem yang cenderung statistik dan Top-Down. Ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat yang cenderung tidak menyentuh kebutuhan pembangunan itu sendiri mendorong percepatan dan reformasi dalam aspek kehidupan terutama peran yang dimainkan secara proporsional oleh berbagai elemen masyarakat. Dalam membahas partisipasi masyarakat pada pembangunan daerah, pemerintah perlu untuk mengetahui perkembangan di daerah terlebih dahulu. Peran pemerintah dalam pembangunan tidak terlepas dari peran dari masyarakat, maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat pada pembangunan desa yaitu melalui program pembangunan

desa, tercermin dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah desa. Dalam pembangunan desa perlu adanya pengawasan pembangunan yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Pengawasan bukanlah semata-mata tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini untuk menggerakkan partisipasi masyarakat itu perlu adanya motivasi yang bersifat kekeluargaan, informasi yang terbuka kepada masyarakat serta memberikan keteladanan yang tampak dan dapat di rasakan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam pembangunan dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak berjalan dengan baik, karena masyarakat yang ikut aktif dalam pembangunan dapat membantu pengawasan

pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model paduan penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat. Konsep ini di landasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang mengakar dan budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpuh pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Tanpa adanya keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan dan memutuskan pembangunan yang ada di desa, hal itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena pembangunan yang baik dan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat harus melibatkan masyarakat itu baik dalam merencanakan, memutuskan bahkan mengawasi pembangunan yang sedang berjalan di desa agar sesuai rencana sebelumnya. Setiap usaha pembangunan yang dilaksanakan tentunya memerlukan suatu keterlibatan dari masyarakat dalam mengawasi segala aktivitas-aktivitas, baik dalam tahap perencanaan, implementasi dan sampai pada tahap evaluasi, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan, bila terjadi penyimpangan segera di perbaiki. Oleh karena itu tanpa partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan itu sendiri, apa yang di rencanakan dan dilaksanakan dapat menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang telah digariskan. Pentingnya pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu program pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Dalam di era yang serba demokratis ini maka suatu pengawasan akan berhasil apabila ada partisipasi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan mutlak dilakukan sehingga selain apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar hasil pembangunan baik fisik

maupun non-fisik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwasannya partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan di desa Taripa, masih rendahnya partisipasi masyarakat dikarenakan ada beberapa faktor misalnya pada saat pelaksanaan musyawarah atau rapat desa, perwakilan yang hadir sangat minim, penyebab dari ketidakhadiran masyarakat adalah aktivitas dari masyarakat yang harus bekerja, ada juga faktor rendahnya partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan adalah pola pikir masyarakat yang masih minim yang menganggap pembangunan itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Pembangunan seharusnya lebih banyak menyertakan masyarakat untuk ikut serta namun dalam kenyataannya yang didapati di lapangan berbeda dengan apa yang diharapkan. Masyarakat desa Taripa kerap kali hanya menunggu pembangunan itu untuk hasilnya. Namun untuk ikut aktif berpartisipasi sangat minim. Adapula masalah kurangnya informasi yang didapat untuk masyarakat dari pemerintah tentang adanya pelaksanaan pembangunan menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan. Kurangnya informasi dalam pembangunan merupakan salah satu alasan masyarakat di desa Taripa untuk ikut serta dalam pembangunan desa, sehingga masyarakat yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa menjadi terkendala. Kesadaran dari masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam mengawasi pembangunan baik dalam tahap perencanaan sampai tahap evaluasi masih sangat kurang, hal ini dapat di lihat dari pembangunan fisik yang ada di desa, seperti pembangunan jalan setapak yang belum semuanya memadai, yang mengakibatkan akses masyarakat menjadi terhambat dan juga pembangunan saluran air atau gorong-gorong yang belum semua diperbaiki, yang mengakibatkan apabila musim hujan saluran air atau gorong-gorong menjadi tersumbat dan tergenang. Oleh karena itu sangat diharapkan bagi setiap masyarakat desa Taripa untuk lebih meningkatkan nilai-nilai gotong royong dan nilai-nilai partisipasi dengan ikut serta dalam proses pengawasan pembangunan yang ada di desa, terlebih khusus desa Tarip kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso. Agar didalam menjalankan proses

pengawasan pembangunan tidak hanya didasarkan atas kepentingan pemerintah melainkan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Tarip setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di desa Taripa sangat rendah sehingga masih banyak pembangunan yang ada di desa belum berjalan dengan baik. Di dalam melaksanakan pembangunan yang baik seharusnya masyarakat ikut serta dalam mengawasi pembangunan dan jangan menganggap pelaksanaan pembangunan hanya tugas pemerintah. Jika masyarakat ikut dan berpartisipasi dalam pembangunan desa akan lebih bagus karena akan adanya pengawasan yang dapat membantu pemerintah dalam proses pembangunan. Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah tersebut, bahwasanya masalah dalam partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya, (1) Pengawasan masyarakat pada pembangunan belum berjalan dengan baik.(2) pengawasan pimpinan dalam hal ini BPD belum berjalan dengan baik, sehingga hasil dari pembangunan tidak maksimal.

TINJAUAN PUSTAKA

KONSEP PARTISIPASI

Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) Partisipasi lebih pada alat sehingga di maknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antara masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Raharjo (dalam Theresia dkk,2015) mengemukakan adanya tiga variasi partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi Terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas.
2. Partisipasi Penuh, artinya partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
3. Mobilisasi Tanpa Partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan pemerintah atau penguasa, tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk turut

mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

PENGERTIAN PENGAWASAN

Makmur (2010) mengemukakan ada sembilan jenis- jenis pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Fungsional, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kelembagaan atau organisasi apapun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, tetapi kelembagaan yang bentuknya besar, seperti kelembagaan negara dengan aktifitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus dibidang pengawasan.
2. Pengawasan Masyarakat, Sebagaimana kita ketahui negara mempunyai masyarakat sebagai warga negara, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara, agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggara pemerintahan, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
3. Pengawasan Administratif, Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang kita istilahkan pengawasan administratif.
4. Pengawasan Teknis, Selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan administratif, sesungguhnya yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan teknis

- karena pekerjaan ini akan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan manusia.
5. Pengawasan Pimpinan, Sebagaimana kita maklumi bahwa setiap kelembagaan senantiasa terdapat dua unsur posisi manusia di dalamnya: pertama, unsur sebagai pemimpin; dan kedua, sebagai unsur yang di pimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja.
 6. Pengawasan Barang, Semuanya orang akan mengatakan bahwa apabila suatu barang dikelola atau diurus oleh seseorang atau sekelompok orang tidak akan terjamin keamanannya apabila tidak ada yang mengawasinya. Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
 7. Pengawasan Jasa, adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas.
 8. Pengawasan Internal, Apabila kita melihat bahwa kelembagaan itu memiliki jangkauan yang luas dan terbentuk sub-sub kelembagaan didalamnya, misalnya kelembagaan negara yang memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, legislatif, yudikatif, auditif dan semacamnya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksudkan disini pengawasan internal.

9. Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub kelembagaan tertentu, misalnya BPK. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK kepada lembaga negara lainnya disebut dengan pengawasan eksternal. Setiap unit kelembagaan senantiasa mengharapkan pengawasan eksternal secara efektif dan efisien dari pada seluruh penggunaan sumberdaya yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan.

PENGERTIAN PEMBANGUNAN

secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan, (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Makmur (2010) Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang, organisasi, maupun yang dilakukan oleh bangsa atau negara dengan mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan dengan mencegah terjadinya suatu bentuk kemiskinan atau kemarjinalan.

KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMBANGUNAN

Partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada BAB VI pasal 68 di jelaskan bahwa masyarakat Desa berhak :

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
3. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada BAB IX paragraf 3 pasal 82 tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa, dijelaskan bahwa :

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkan dalam musyawarah Desa paling sedikit satu tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Menurut Moleong (2013), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

FOKUS PENELITIAN

Dari penerapan sebelumnya pengembangan partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan merupakan unsur yang sangat penting, sebab dengan adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan yang dilakukan pasti akan berjalan dengan baik dan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi di maksudkan untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan dan menjalankan proses pengawasan pembangunan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Konsep menjadi fokus dalam penelitian ialah Partisipasi Masyarakat Pada

Pengawasan Pembangunan Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso. Dengan ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Makmur (2010) yaitu: (a) Pengawasan masyarakat dan (b) Pengawasan pimpinan.

PENELITIAN TERDAHULU

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Tolombukan yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya, oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah mengenai apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat yang muncul adalah adanya dukungan dari mereka yang merupakan dorongan bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, tanpa adanya partisipasi maka dipastikan suatu desa tidak akan bisa melaksanakan pembangunan desa dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Masyarakat

Bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah dapat dalam bentuk melembaga dan tidak melembaga. Pengawasan melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara terlembaga, seperti temu wicara, petisi, pernyataan sikap, rekomendasi, resolusi dan demosntrasi damai. Sedangkan pengawasan yang tidak melembaga, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara yang tidak terlembaga misalnya demonstrasi liar, penyebaran pamflet-pamflet yang tidak sopan, caci maki, pemogokan umum, pemboikotan, pembangkangan, sabotase dan perusakan. Bentuk pengawasan masyarakat didesa Taripa sudah dimulai sejak awal program disusun. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui program apa saja dan berapa anggaran yang

dibutuhkan berakaitan dengan pelaksanaan program yang akan dilakukan di desa. Dalam tahapan pelaksanaan program selain mengawasi, masyarakat pun diajak untuk terlibat aktif baik tenaga maupun dalam hal pengawasan.

Berhubungan dengan pengawasan masyarakat, bentuknya seperti ketika masyarakat menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan, maka masyarakat tidak menggunakan cara-cara yang kurang baik seperti yang dijelaskan dalam pengawasan tidak melembaga (pengawasan Informal), tetapi masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa untuk duduk bersama membicarakan tentang pelaksanaan pembangunan yang mengalami kendala tersebut.

2. Pengawasan Pimpinan

Melihat hasil penelitian dan pendapat informan, bahwa pemerintah desa sudah berperan penting dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam musrembang. Hal ini disebabkan karena melihat tingkat partisipasi masyarakat untuk hadir danturut menyampaikan ide-ide dan gagasan mereka dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan di desa. Jika dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrembang maka dapat dikatakan peran pemerintah tergolong tinggi dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak hanya sampai pada penentuan program tetapi juga sampai tahap pengawasan, hal ini dilakukan oleh pemerintah desa Taripa dalam rangka terlaksananya pembangunan di desa. Jika dilihat dari partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi ide-ide atau pemikiran yang masyarakat berikan untuk menyukseskan pembangunan didesa tergolong tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sesuai dengan fokus penelitian makapenulis menarik kesimpulan mengenai Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pembangunan Di Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Posobahwa:

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan dapat dikatakan berjalan

dengan baik walaupun masih ada masyarakat yang tidak mengambil peran dalam merencanakan dan mengawasi pembangunan yang ada. Pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pembangunan di desa taripa sudah mengalami peningkatan dimana sebagian besar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan begitu terlihat dengan adanya permintaan masyarakat untuk memberikan informasi pembangunan dengan jelas dan terperinci.

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pembangunan sudah berjalan baik dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh para pengawainya untuk mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat merugikan kelembagaan itu sendiri.

SARAN

Masyarakat Desa Taripa Kecamatan Pamona timur Kabupaten Poso

perlu merubah paradigma dan lebih menyadari bahwa begitu pentingnya partisipasi masyarakat pada pengawasan proses pembangunan desa guna keberhasilan pembangunan, oleh karena itu saran dari penulis:

1. Perlunya motivasi melalui kepemimpinan kepala desa dalam menimbulkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan desa karena sangat membantu dalam menentukan berhasilnya pembangunan di desa.
2. Perlunya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
3. Masyarakat diharapkan ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
4. Perlunya pemerintah desa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012, Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, teori, dan implikasinya di era revormasi, Bandung, Alfabeta
- Adisasmata, Raharjo, 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Fifie rorong, joyce Jacinta rares, joorie r ruru. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infratraktur di Desa Tolumbukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik Unsrat. Vol 3 No 046.
- Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi, (Cetakan Pertama).Surakarta :Kompip.
- Huda Ni'matul. 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yogyakarta:FH. UII Press
- Makmur.. 2009. Teori Manajemen Sratejik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan. Bandung:Refika Aditama
- Makmur. 2010. Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Bandung:PT Refika Aditama
- Moleong Leksi, J. 2013. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Ndraha. T. 2003. Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan di Beberapa Desa. Jakarta : Yayasan Karya Dharma.
- Ripai, A. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Makasar: UNHAS
- Theresia, A, dkk, 2015, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta.